

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dari masa lalu hingga saat ini, seiring dengan berjalannya waktu, teknologi paling modern dan tercepat telah berkontribusi pada perkembangan dunia. Transformasi teknologi digital masih memiliki potensi besar dalam komputerisasi, dan telah mendorong banyak ilmuwan untuk menggabungkan penemuan-penemuan terbaru dari yang paling rendah hingga yang paling zaman, seperti teknologi komputasi.

Terdapat 60% kasus yang ditangani oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian adalah hasil dari investigasi oleh BPK yang meliputi seluruh Indonesia terdiri dari 542 Kabupaten Kota, 34 Provinsi (seperti BUMN, BUMD) dan terdapat 86 kementerian lembaga di pemerintah pusat.

Dari data tersebut sebelum menggunakan teknologi informasi dalam pengungkapan *fraud* harus membutuhkan waktu yang cukup lama dan terbatas. Sementara, aparat penegak hukum ingin melakukan perhitungan kerugian negara dengan cepat. Sehingga saat ini untuk penggunaan teknologi informasi, kendala tersebut data diatasi sehingga cakupan pemeriksaan investigasi dapat lebih luas dan cepat.

Pemeriksaan investigasi yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menemukan kerugian keuangan negara dengan teknologi informasi dengan harapan hasil dari pemeriksaan investigasi adalah final dan banding sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Hal ini, membuat para audit investigatif memudahkan dalam proses mengumpulkan, mencari, menemukan, menganalisis dan mengevaluasi data. Dari alat bukti yang di temukan dengan cara sistematis oleh pihak berkompeten, integritas, independensi serta profesionalisme, sehingga proses tersebut dapat di ringkas dengan adanya bukti-bukti secara sistematis sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pengungkapan fakta terkait korupsi.

Menurut (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017) untuk mendapatkan serta evaluasi sebuah bukti melalui proses sistematis mengungkapkan fakta adalah tujuan dari sebuah audit untuk mengkorelasi pernyataan dan kenyataan yang sebenarnya telah disetujui dan di terima oleh subjek audit. Sehingga hasilnya akan diberitahukan dalam bentuk informasi akuntansi yang dibutuhkan kepada pihak-pihak terkait.

Audit investigatif di Indonesia begitu berkembang dengan cara perlahan dan digunakan dalam menemukan berbagai kasus *fraud* yang menitik beratkan audit investigatif dalam upaya penegakan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Kegiatan-kegiatan penyimpangan saat diduga didalamnya terjadi tindakan *fraud* adalah sasaran audit investigatif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efektivitas pelaksanaan audit investigatif *fraud* sering terjadi dikarenakan kemampuan auditor dalam pengungkapan berbagai macam kasus kecurangan dalam audit investigatif dengan bukti audit yang dihasilkan nyata dan relevan. Sehingga supaya proses investigasi efektif, harus dimungkinkan untuk memberikan bukti kecurangan yang sebelumnya ditentukan oleh para pihak.

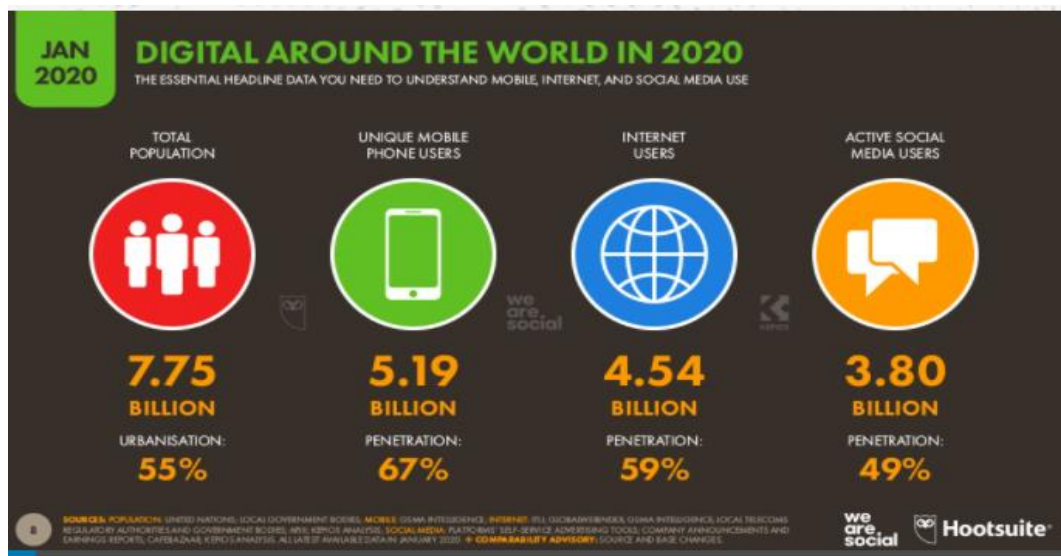
Atas permintaan pemimpin daerah dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa agung, dan KPK), lakukan investigasi termasuk pemeriksaan keuangan publik. Hasil dari tindakan pengendalian yang dilakukan dalam bentuk rekomendasi pengambilan keputusan bergantung pada tingkat penyalahgunaan kekuasaan, dan kredibilitas kekuasaan tersebut dapat dibuktikan melalui pengaduan atau informasi publik.

*Fraud* adalah cara di mana seseorang atau kelompok dapat mengambil keuntungan dari tindakan yang merugikan pihak lain atau kelompok lain. Kebohongan, pencurian, teknologi, dan pencurian adalah beberapa contoh penipuan. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan “*fraud tree*” sebagai salah satu cabangnya, yaitu korupsi. Tidak akan ada habisnya di Indonesia, dan korupsi semakin meningkat. Perekonomian adalah salah satu dari semua sektor, dan perekonomian adalah sumber kehidupan dan pertumbuhan bagi bangsa dan negara.

Tindak *fraud* (kecurangan) kini tersebar luas, bahkan menembus bidang pasar modal. Keahlian koruptor dalam menggunakan teknologi akan berbahaya jika

disinergikan dengan birokrasi penjahat politik, dan pejabat negara yang bermain di dalamnya. Kondisi ini selanjutnya akan mendorong praktik korupsi di negara ini. Disisi lain teknologi dapat membantu auditor untuk mendeteksi, melacak, dan bahkan mencegah penipuan secara efektif. Teknologi digital memiliki banyak peran ketika dikaitkan dengan penipuan. Teknologi juga memberikan banyak bantuan untuk auditor terutama untuk mendeteksi, mencegah, dan memeriksa penipuan.

Menurut (RI, 2008) “UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Informasi Elektronik menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dan dalam pasal 17 tentang Transaksi Elektronik Ayat (1) dijelaskan Undang-undang ini memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara pemerintahan, perseorangan, badan usaha, dan / atau masyarakat. Teknologi informasi harus digunakan secara tepat, cerdas, bertanggung jawab, efektif dan efisien untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.”



Sumber : <https://wearesocial.com/digital-2020>

**Gambar 1. Digital Around The World In 2020**

Syarifuddin (2020) dalam bukunya mendefinisikan bahwa Transformasi digital merupakan bagian dari cabang ilmu sains, dapat diartikan sebagai perubahan atau pergeseran yang terjadi akibat dampak penggunaan kombinasi inovasi digital

Baroroh Shofiati, 2021

**ANALISIS AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN FRAUD PADA TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

yang mengarah pada perubahan struktur, nilai, proses, posisi atau ekosistem di dalam organisasi dan lingkungan di luar organisasi.

Teknologi digital adalah sebuah sistem komputerisasi dalam sistem otomatis pengoperasian sehingga tidak perlu memerlukan tenaga manusia untuk mengerjakan secara manual. Pada dasarnya teknologi digital membuat secara cepat dengan menampilkan bentuk-bentuk sistem perhitungan dalam memberikan informasi menjadi bentuk digital atau bentuk gambar dan grafik.

Sejak tahun 1980 hingga saat ini transformasi teknologi dari titik rendah hingga tertinggi seperti, teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang mengakibatkan perubahan di setiap generasi remaja pada tahun 80-an, sehingga menimbulkan revolusi digital yang hingga saat ini berkembang dalam teknologi dunia yang semakin canggih dan lebih efisien dan menghemat waktu. Zulki (2017)

Berikut ini beberapa fenomena dari beberapa kasus yang telah dan sedang ditangani oleh audit investigatif BPK mengenai *fraud* yang telah terjadi.

Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 pukul 14.00 Firman Sampurna selaku Ketua Utama BPK telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan perkara PT Asuransi Jiwasraya pada 30 Desember 2019 atas permintaan Kejaksaan Agung untuk menghitung kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dari tahun 2008 hingga 2018 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dalam kasus Jiwasraya, hasil perhitungan kerugian negara yang dipublikasikan mencapai Rp 16,81 triliun.

Menurut hasil audit, BPK telah menyimpulkan bahwa terkait proses perencanaan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pihak-pihak tersebut telah menyimpang ke dalam peraturan perundang-undangan karena perolehan dalam nilai investasi saham dan reksa dana yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020)

Dalam kasus PT Asabari, Hery Subowo selaku Auditor Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan bahwa sudah telah melakukan investigatif berdasarkan informasi atas dugaan adanya kasus penyelewengan sistem

operasional pada PT Asabri sejak tahun 2013. "Pertimbangan investigatif adalah berdasarkan informasi awal dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada PT Asabri pada 2013 mengenai program santunan, THT (Tunjangan Hari Tua), Dapen (Dana Pensiun), biaya operasional, dan belanja modal serta PKBL PT Asabri pada 2011-2012," jelas Hery dalam konferensi pers BPK virtual, Selasa (29/12/2020).

Hery menerima surat permintaan oleh KPK untuk memeriksa kerugian negara pada 15 Januari 2018. Dalam menangani Asabri, BPK juga dikirim surat oleh Polda Metro Jaya perihal permintaan perhitungan kerugian negara, yang suratnya diterima oleh BPK pada 31 Januari 2008. Kemudian, Bareskrim Polri meminta BPK untuk melakukan audit investigasi dan joint investigation, dengan surat yang diterima BPK pada 4 Februari 2020.

Untuk mengetahui hasil dari audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian perusahaan di tubuh Asabri mencapai Rp 17 triliun. Nilai kerugian Rp 17 triliun tersebut lebih besar dari kerugian di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang nilainya mencapai Rp 16,8 triliun, berdasarkan potensi kerugian negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Fungsi investigatif atau kerugian negara itu bersifat responsif jika ada permintaan. Bahkan untuk peralihan dari kepolisian ke Kejagung di luar kewenangan BPK, Terkait nilai kerugian negara pada Asabri, sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan pemeriksaan masih bersifat investigatif," jelas Hery. (cnbcindonesia.com, 2020)

Selanjutnya terdapat kasus BLBI yang menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas hasil pemeriksaan terdapat kerugian negara sebesar Rp 4,5 Triliun, dimana pihak penggugat merupakan Sjamsul melalui kuasa hukumnya yaitu Otto Hasibuan. Sedangkan tergugat disebutkan atas nama I Nyoman Wara, yang merupakan auditor BPK. Pengacara Sjamsul Nursalim yaitu Otto Hasibuan telah menggugat BPK atas hasil audit BLBI dengan alasan bahwa BPK melakukan audit tanpa mengkonfirmasi apapun ke pihak Sjamsul selaku auditee atau pihak yang diaudit. Menurutnya, BPK melakukan audit berdasarkan permintaan KPK dan hanya menggunakan data dari KPK.

Otto Hasibuan mengatakan "Jadi KPK minta BPK tolong periksa ini, tapi bukti dari KPK. Mestinya, prosedurnya itu BPK harus mengkonfirmasi bukti-bukti

ini kepada pihak terkait benar nggak bukti ini, umpanya ada di dalam proses BPK itu ada audit ada auditee. Dikatakan, auditee itu yang diperiksa harus ditanya dong.” (news.detik.com, 2019)

Adapun perkiraan kerugian yang terjadi mencapai Rp 6 triliun pada kasus Pelindo II. Masalahnya adalah masalah yang dibutuhkan untuk menentukan masalah teknis. Namun BPK sendiri sangat berkomitmen dan kami tunggu supaya mendapatkan tim ahli. seperti yang dijelaskan Agung Firman Sampurna sebagai ketua BPK. “Kami punya 4 laporan hasil pemeriksaan terkait JICT, Koja Peti Kemas Koja, Global Bond, dan Kali Baru. Di 4 laporan hasil pemeriksaan tersebut, kerugian negaranya mencapai angka sekitar lebih dari Rp 6 triliun,” seperti yang disampaikan oleh Agung Firman Sampurna sebagai ketua BPK.

Agung mengatakan mungkin sebulan atau dua bulan bisa diselesaikan tidak masalah. Dalam kasus Pelindo II sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh BPK. Agung mengatakan, BPK juga berhasil mengidentifikasi kerugian. BPK serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, tapi yang hebat adalah angka. Kewenangan BPK adalah angka. Dari 4 kasus yang disebutkan Agung dan diselesaikan BPK, kerugiannya melebihi Rp 6 triliun. Kasus Pelindo II ini merupakan hasil dari investgasi atas terjadinya kerugian negara yang disebabkan oleh *fraud*. (cnbcindonesia.com, 2020)

Penguasaan teknologi yang berkembang dengan cepat ini merupakan tantangan bagi penyidik digital dan penegak hukum. Upaya-upaya untuk peningkatan pemahaman dan kemampuan harus terus ditingkatkan. Penilaian dalam tahapan audit investigatif dilakukan dengan membandingkan praktik dengan prosedur yang terdapat dalam pedoman teknis audit investigatif. PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri adalah kasus pengungkapan *Fraud* saat ini yang masih dalam penanganan BPK.

Diantara kasus-kasus tersebut, BPK sudah pasti mengaudit perusahaan lain saat berada dalam masalah dalam laporan keuangannya yang mengakibatkan kerugian negara dan tindak pidana korupsi, sehingga saya sebagai peneliti ingin mempelajari atau memahami bagaimana awal proses Transformasi Teknologi Digital yang digunakan oleh BPK pada saat audit investigatif suatu kasus tersebut hingga saat ini.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Terdapat hal menarik untuk dianalisis bagaimana penerapan dan pengembangan audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital di BPK yang dilaksanakan oleh auditor investigatif BPK. Bagaimana proses audit investigatif pada transformasi teknologi digital dalam pengungkapan *fraud* di BPK menanggapi dan menjawab sanggahan terhadap pertanyaan penulis yang akan diajukan kepada auditor.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran audit investigatif oleh BPK dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital?
2. Bagaimana BPK melakukan proses audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital ?
3. Apa kendala yang dihadapi auditor investigative dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital?
4. Bagaimana BPK menyikapi sanggahan dan gugatan atas hasil audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami bagaimana peran audit investigatif oleh BPK dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital.
2. Untuk memahami bagaimana BPK melakukan proses audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital.
3. Untuk memahami apa kendala yang dihadapi auditor investigatif BPK dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital.
4. Untuk memahami bagaimana BPK menyikapi sanggahan dan gugatan atas hasil audit investigatif dalam pengungkapan *fraud* pada transformasi teknologi digital.

## I.5 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah manfaat yang diharapkan mampu memberikan evaluasi yaitu:

### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bukti empiris dalam literatur sebagai landasan atas dasar pengembangan ilmu pengetahuan di bidang audit, khususnya pemberantasan korupsi di pemerintah pusat dan daerah yang menjadi dasar dan referensi untuk penelitian kedepannya memberantas korupsi. dengan transformasi teknologi digital pada kasus korupsi yang terjadi.

### 2. Aspek Praktis

- a. Bagi pemerintah pusat dan daerah, penelitian ini bermanfaat untuk meminimalisasi *fraud* terutama korupsi yang ada di Indonesia. Sehingga kasus *fraud* yang terjadi dapat menambah wawasan mengenai praktik auditor khususnya pada transformasi teknologi digital dan dapat diterapkan pada instansi pemerintah yang lain, khususnya di lingkungan kementerian di Indonesia. Agar mencegah terjadinya kasus *fraud* berupa korupsi yang merugikan keuangan negara.
- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi yang memberikan informasi teoritis serta empiris mengenai penggunaan teknologi digital pada pemeriksaan investigasi dalam permasalahan kasus *fraud* yang ada di Indonesia maupun dunia.